

POLICY BRIEF

Optimalisasi Kebutuhan Ruang Destinasi Pariwisata Unggulan Provinsi Gorontalo

Muh. Fakhri Jamaluddin¹; Mahyudin Humalangi²

¹Fakultas Teknik dan Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Taruna;
fakhrimuh.jamaluddin@gmail.com

²Bappeda Provinsi Gorontalo

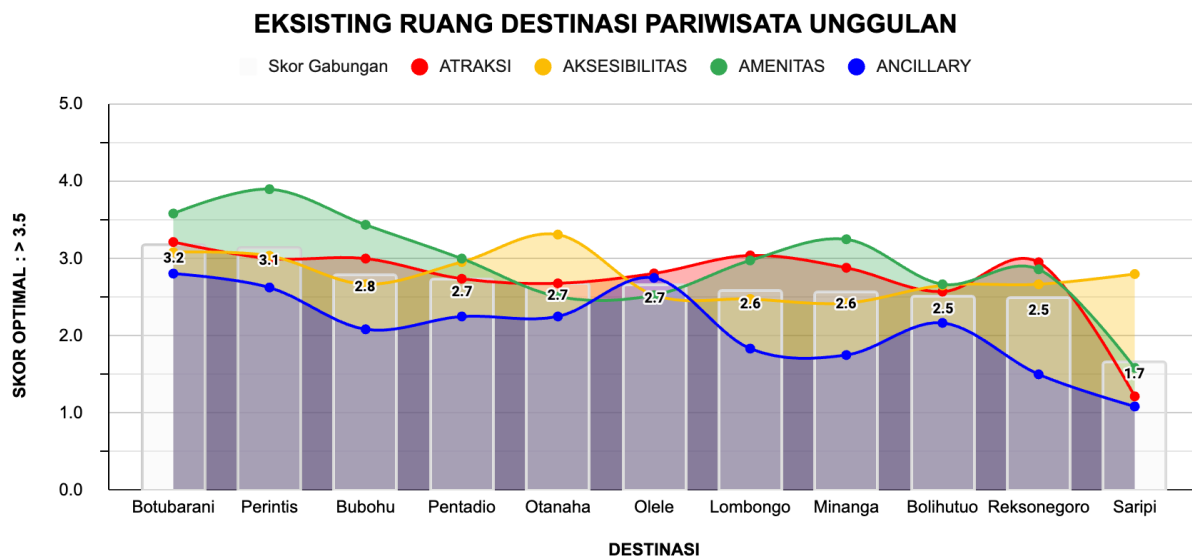
Ringkasan Eksekutif

Hasil riset terhadap 11 destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa kualitas ruang destinasi masih berada pada kategori Perlu Intervensi Sedang. Skor rata-rata 2,6 menandakan bahwa empat komponen utama yaitu, atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary, belum saling menguatkan untuk menghadirkan pengalaman wisata yang unggul, aman, dan berkelanjutan. Dua destinasi seperti Botubarani (3,2) dan Perintis (3,1), berada mendekati kategori Destinasi Optimal atau Siap dengan Perbaikan Dasar, sedangkan Saripi (1,7) sebagai bagian khas situs geo-heritage di Aspiring Geopark Gorontalo membutuhkan Intervensi Besar. Kelemahan paling menonjol terdapat pada ruang ancillary (2,1) yang menjadi penentu tata kelola, keselamatan, dan dukungan wisatawan. Optimalisasi ruang destinasi di Gorontalo harus dilihat sebagai **agenda strategis provinsi** untuk memperkuat **pariwisata sebagai sektor prioritas** yang berimplikasi langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, intervensi harus terintegrasi, berbasis data, dan lintas-sektor.

Kata kunci: Optimalisasi Ruang, Destinasi Unggulan, Potensi PAD

Permasalahan Utama

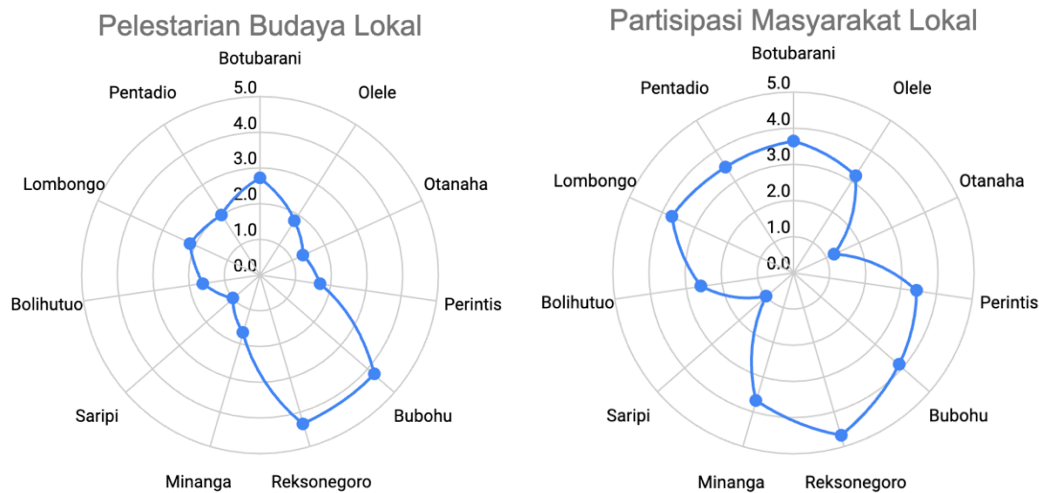
Kualitas ruang destinasi di Provinsi Gorontalo masih timpang, dengan hanya sebagian kecil yang mendekati kondisi optimal sementara mayoritas destinasi berada di bawah standar minimal. Kelemahan paling nyata terlihat pada komponen ancillary seperti ketiadaan pusat informasi wisata, minim pemandu terlatih, fasilitas keselamatan yang terbatas, serta digitalisasi yang hampir tidak berjalan. Amenitas pun belum merata, banyak destinasi yang belum memenuhi standar kenyamanan, keberlanjutan, dan konsistensi layanan. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi spasial dan infrastruktur dasar secara menyeluruh agar seluruh destinasi dapat mencapai kualitas ruang yang layak.



Sumber: BAPPEDA, 2025

Aksesibilitas menuju destinasi, terutama kawasan bahari dan wilayah yang jauh dari pusat layanan kota, masih belum inklusif. Hambatan pada kualitas jalan, transportasi wisata, dan keterhubungan digital mengurangi daya tarik dan membatasi alur kunjungan. Selain itu, atraksi di banyak destinasi belum terdiferensiasi dan belum dikelola menjadi pengalaman yang utuh, edukatif, dan ramah lingkungan. **Ketiadaan diversifikasi pengalaman** menyebabkan wisatawan hanya menikmati satu bentuk atraksi, tanpa alternatif jika kondisi alam berubah atau atraksi utama tidak dapat

diakses. Hal ini memperlihatkan perlunya **penguatan konektivitas fisik dan digital sekaligus inovasi atraksi** agar ruang destinasi lebih adaptif dan menarik.



Sumber: BAPPEDA, 2025

Terkait isu sosial-budaya, skor pelestarian budaya lokal yang sangat rendah (2,20) dan partisipasi masyarakat yang hanya berada pada level sedang (3,10) menunjukkan adanya jarak antara kekayaan budaya yang dimiliki Gorontalo dan kapasitas masyarakat untuk menghidupkannya sebagai bagian dari pengalaman wisata. **Budaya tetap hidup dalam keseharian, tetapi tidak berhasil diterjemahkan menjadi produk wisata** yang terstruktur, sementara masyarakat banyak terlibat pada aspek operasional tanpa benar-benar memiliki ruang strategis untuk mengelola dan mengemas identitas budaya mereka sendiri. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa **kedua dimensi berjalan sendiri-sendiri** dan belum dipertautkan dalam desain destinasi. Karena itu, dibutuhkan intervensi pemerintah yang secara sengaja menyatukan pelestarian budaya dan partisipasi masyarakat, mulai dari program *repackaging* budaya berbasis komunitas, inkubasi usaha budaya, hingga fasilitasi kapasitas *storytelling* dan interpretasi budaya oleh warga agar warisan budaya tidak hanya terjaga, tetapi juga menjadi pengalaman wisata yang bernilai, inklusif, dan menguntungkan bagi masyarakat sekitar destinasi.

Selanjutnya, **Pengembangan ruang destinasi belum ditopang oleh mekanisme kolaborasi** lintas OPD dan lintas-stakeholder yang solid, padahal pariwisata merupakan sektor *transboundary* yang menuntut keterlibatan pemerintah, akademisi, swasta, BUMN, komunitas, NGO, dan media secara simultan. Ketidakselarasan ini membuat berbagai isu strategis mulai dari perubahan iklim, tekanan ekonomi informal, risiko bencana pesisir, hingga tuntutan standar nasional belum terintegrasi dalam desain dan pengelolaan ruang destinasi. Tanpa tata kelola terpadu, upaya optimalisasi ruang destinasi akan berjalan parsial dan sulit menjawab tantangan global, nasional, dan lokal secara berkelanjutan.

Tujuan Kebijakan

1. Mengoptimalkan ruang destinasi agar memenuhi prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan adaptasi iklim.
2. Memperkuat ekosistem pariwisata provinsi melalui sinergi OPD, komunitas, swasta, dan BUMN.
3. Mewujudkan Destinasi Unggulan Gorontalo yang berdaya saing regional dan memenuhi standar nasional.
4. Mendorong pariwisata sebagai sektor prioritas yang meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat identitas daerah.

Rekomendasi Kebijakan

1. Membangun Kerangka Ruang Destinasi Terintegrasi

Pengembangan ruang destinasi perlu dimulai dengan penetapan **Peta Ruang Destinasi Pariwisata Provinsi Gorontalo** yang mencakup empat elemen utama, atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary, sebagai fondasi penataan kawasan wisata. Kerangka ini diperkuat melalui pengembangan koridor destinasi yang menghubungkan aspek fisik, ekologis, dan kultural untuk memastikan aliran wisata yang terstruktur dan berkelanjutan. Seluruh perencanaan diwajibkan mengacu pada

standar daya dukung lingkungan (DDL) dan daya tampung wisata (DTW) guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan keberlanjutan sumber daya. Upaya ini diorkestrasi oleh BAPPEDA bersama Dinas Pariwisata, DLH, dan PUPR sebagai OPD pengampu utama. Tidak lupa mengaitkannya dengan DPMPTSP sebagai ruang investasi dalam upaya penciptaan potensi PAD baru.

2. Optimalisasi Aksesibilitas Fisik dan Digital

Melalui Strategi Ruang **STRATA Go! (Sistem Ruang Aksesibilitas Terpadu Pariwisata Gorontalo)**, ekosistem ini dimulai dari peningkatan aksesibilitas dengan memperbaiki jaringan jalan destinasi oleh PUPR, menata moda transportasi wisata beserta kapasitas dan keselamatannya oleh Dishub, serta memperkuat konektivitas digital melalui layanan Wi-Fi publik dan navigasi daring oleh Kominfo. Untuk destinasi pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dermaga dan lintasan laut melibatkan Dishub Laut, DKP sebagai konseptor berbasis ekologi kelautan, dan ASDP. Inisiatif ini diperkuat oleh kolaborasi BUMN, swasta sektor transportasi, NGO, komunitas dan akademisi yang fokus pada kajian berbasis aksesibilitas.

3. Peningkatan Amenitas Berkelanjutan dan Inklusif

Melalui program *Amenity Matters*, destinasi diarahkan untuk memiliki amenitas yang bersih, standar, inklusif, serta ramah bagi semua kalangan. Intervensi mencakup penyediaan toilet dan sanitasi layak, ruang ibadah, titik teduh, area UMKM terkurasi, RTH destinasi, hingga penggunaan energi bersih sebagai bagian dari penguatan pengalaman wisata. Pengembangan amenitas disertai reaktivasi kios UMKM melalui koordinasi dengan Dinas Perindag & UMKM, dengan dukungan komunitas kebersihan, pelaku UMKM, sektor F&B, BUMN, CSR, dan media untuk edukasi perilaku wisata.

4. Pengembangan Fasilitas Pendukung (Ancillary) yang Adaptif

Melalui *Gorontalo Tourism Support Corridor*, destinasi diperkuat dengan penyediaan *Tourism Information Center* (TIC), *Gorontalo Tourism Command Center* (GTCC), sistem kebersihan terpadu, titik daur ulang, CCTV, rambu keselamatan, serta pos jaga. Integrasi mitigasi bencana bersama BMKG–BPBD menjadi prioritas khususnya untuk destinasi pesisir yang memiliki risiko tinggi. Program ini diperkuat lewat kemitraan dengan NGO, BUMN, CSR, perguruan tinggi, dan komunitas lokal.

5. Diversifikasi Atraksi dan Pengalaman Wisata

Melalui strategi **1 DTW : 5 Atraksi**, diversifikasi dilakukan dengan mengembangkan *storytelling* berbasis budaya lokal, atraksi ramah ekologi di kawasan hutan, pesisir, dan geowisata, serta penguatan event lokal menuju konsep 1 Destinasi : 1 Event. Selain itu, atraksi edukatif seperti museum mini, galeri interpretasi, dan demonstrasi kerajinan atau memasak makanan khas diperkuat untuk memperkaya pengalaman wisatawan. Proses ini didukung komunitas budaya, paguyuban lokal, akademisi, mitra swasta atraksi, dan media.

6. Tata Kelola Ruang Berbasis Komunitas

Optimalisasi ruang destinasi memerlukan tata kelola berbasis komunitas yang memungkinkan desa wisata menjadi pusat pengelolaan ruang secara partisipatif. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan pemandu lokal, *storytelling*, manajemen konservasi, dan layanan wisata. Implementasi berjalan melalui skema *co-management* antara pemerintah daerah, jejaring komunitas, dan NGO, dengan dukungan Dinsos dan Dispora.

7. Penguatan Kolaborasi Multi-OPD dan Multi-Stakeholder

Untuk memastikan koordinasi lintas sektor yang efektif, perlu dibentuk **Forum Ruang Destinasi Provinsi** sebagai wadah kolaborasi antara OPD teknis, BUMN, lembaga negara, akademisi, NGO/komunitas, asosiasi pariwisata, media, serta sektor swasta. Forum ini diperkuat dengan penyusunan matriks peran OPD oleh BAPPPEDA agar setiap intervensi berjalan terarah, terukur, dan sesuai mandat kelembagaan.

8. Skala Prioritas Intervensi Ruang per Destinasi

Prioritas percepatan diberikan kepada destinasi dengan skor di atas 3.0 seperti Botubarani dan Perintis yang membutuhkan penguatan inovasi dan layanan. Destinasi pada rentang 2.5–3.0 seperti Bubohu, Pentadio, Otanaha, Olele, Lombongo, Minanga, Bolihutuo, dan Reksonogoro diarahkan pada intervensi peningkatan berbasis kebutuhan. Sementara itu, Saripi sebagai satu-satunya destinasi dengan skor di bawah 2.5 memerlukan pengembangan menyeluruh terutama terkait layanan dasar, tata ruang, kebersihan, dan pemberdayaan masyarakat.

Rekomendasi Utama untuk Gubernur

1. Menetapkan Program Prioritas **Optimalisasi Ruang Destinasi Unggulan Gorontalo** sebagai program kolaborasi dan lintas-OPD;
2. Mengeluarkan Instruksi Gubernur / Pergub tentang **Integrasi Perencanaan Ruang Destinasi Pariwisata Berbasis Koridor**;
3. Mengalokasikan pembiayaan kolaboratif (APBD + CSR) dan mengembangkan Ekosistem Investasi *Blue Tourism* untuk mendorong PAD sektor pariwisata Gorontalo; dan
4. Menetapkan **3 destinasi unggulan percepatan** dan **3 destinasi revitalisasi** sebagai *pilot project* dari program prioritas **Optimalisasi Ruang Destinasi Unggulan Gorontalo**.

Penutup

Pariwisata adalah wajah Gorontalo di tingkat nasional maupun global. Citra ruang destinasi yang tertata, inklusif, dan adaptif akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, pelestarian lingkungan, serta penguatan budaya lokal. Dengan penyusunan strategi ruang yang terukur, kolaboratif, dan berbasis data, Provinsi Gorontalo dapat memantapkan diri sebagai salah satu model pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur.